

**STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PWNu SUMSEL
DALAM PILPRES 2019
(STUDI PILPRES 2019)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gerlar Sarjana Sosial (S.Sos)**

Oleh :

NURUL OKTAWATI

1654300028

**PRODI POLITIK ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2020

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana strategi komunikasi politik Nahdlatul Ulama PWNU dan pandangan pengurus PWNU dalam menyikapi pencalonan Ma'ruf Amin dalam pemilihan wakil presiden 2019. Secara spesifik penelitian ini akan mengurai politik NU pilpres 2019. NU merupakan salah satu organisasi masyarakat keagamaan terbesar yang ada di Indonesia.

Gerakan kaum trans-nasionalis (modernis) dikalangan umat Islam yang mengancam keberlangsungan tradisi ritual keagamaan khas umat Islam tradisional. Walaupun mengaku berpaham dan berlebel Aswaja tapi perilakunya terkesan radikal, penuh tindak kekerasan, dan merasa hanya kelompoknya yang paling benar dan paling Islam. Kelompok lain yang tidak sama dengan paham mereka dianggap salah dan bahkan keluar dari ajaran Islam. Padahal justru dari perilaku mereka itu akan menimbulkan cap negative terhadap Islam secara keseluruhan yang sejatinya mempunyai misi rahmatan lil al-amin.

Perilaku semacam itu juga dapat menimbulkan perpecahan dikalangan umat Islam PWNU Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas penyebar ajaran AhlulSunnah waljama'ah pada saat ini sangat mendapat tantangan yang lebih berat dengan keberadaannya di wilayah bukan basis NU.

Dimana PWNU merupakan Pengurus tertinggi di Provinsi Sumatera selatan bagi Nahdlatul Ulama sebagai penyebar ajaran AhlulSunnah. Pandangan pilpres 2019 NU struktural mungkin cenderung condong ke kubu Jokowi-Ma'ruf.¹

¹Iklan Beri, *Strategi komunikasi dakwa pwnu* tahun 2016

NU bukan organisasi yang berisi orang-orang yang seragam pemikiran dan kecenderungan ideologi politiknya. Keragaman pandangan di internal NU ini bisa berarti bahwa meski ada kekhawatiran dari sebagian orang akan ancaman konservatisme agama yang semakin mengakar dengan keberadaan Ma'ruf Amin dalam pemerintahan Jokowi, NU memiliki kapasitas untuk menyediakan wacana tandingan dari internal komunitasnya.² melihat pada tiga aspek argumentasi yang menjadi alasan pemilihan penelitian yakni politik NU dalam aspek budaya politik dan partisipasi.

Namun sebenarnya kenyataan ini tak selamanya menguntungkan bagi NU karena akan menimbulkan kesan seolah-olah NU baik secara organisatoris maupun kultural merupakan komunitas yang sepanjang sejarahnya selalu disibukkan dengan berbagai masalah politik praktis. Asumsi ini tentu kurang sejalan dengan kenyataan bahwa NU lahir dengan memegang khittah sebagai *jam'iyah diniyah* (organisasi keagamaan) yang mengembangkan mazhab *ahlul al-sunnah wa al-jamaah* (Aswaja).

Sebagai sebuah organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. NU jelas memiliki bobot politik yang tinggi dan sangat diperhitungkan. Karenanya tak heran bila tiba musim pemilu, juga pilkada, organisasi yang didirikan pada 31 Januari 1926 ini selalu digadag-gadag sebagai kendaraan kampanye, ditempatkan sebagai sarana kemenangan politik pragmatis. Bahkan tidak jarang kader-kader NU pun ikut terjun langsung bersaing di pentas politik, baik lokal maupun nasional.

Dalam khittah 1926 secara tegas disebutkan, NU sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi masyarakat manapun. Meski demikian, poin ini tidak mengikat warga NU secara individual untuk menggunakan hak politiknya sebagaimana dijelaskan pula di rumusan khittah tersebut. NU sebagai sebuah organisasi massa tidak mungkin menghilangkan hak warga negara untuk berpolitik. Namun sejarah mencatat organisasi ini pada akhirnya sempat malang-melintang di dunia politik praktis. Bermula dari Majelis Syuro

²NU Pasca, *Nasionalisme Mendahului Demokrasi* diakses pada 7 agustus 2019 .

Muslimin Indonesia (Masyumi) dan akhirnya keluar pada tahun 1952, NU kemudian membentuk partai sendiri. Sebagai sebuah kekuatan politik formal, NU menjadi amat diperhitungkan, setidaknya mulai dari Pemilu 1955 hingga Pemilu 1971. Namun perubahan situasi politik nasional, dua tahun kemudian, membuat NU dan komunitas Islam lainnya dipaksa berfusi ke dalam PPP.

Intrik intrik politik yang begitu kuat, berbahaya, dan sering terjadi bahkan di antara kelompok Islam sendiri sempat membuat NU agak kewalahan dan mulai berfikir kembali ke khittah. Setidaknya wacana ini menguat pada Mukhtamar NU di Situbondo, Jawa Timur (1984), yang pada akhirnya disepakati, sikap politik NU diarahkan sebagai lembaga pengontrol dan penyumbang gagasan atas segala persoalan bangsa. Sebenarnya, peringatan tentang bahaya (bermain) politik sudah sempat dilontarkan sejumlah pemikir politik Islam klasik (fiqh siyasah), mulai dari al-Mawardi, al-Ghazali, hingga Ibn Taymiyyah.

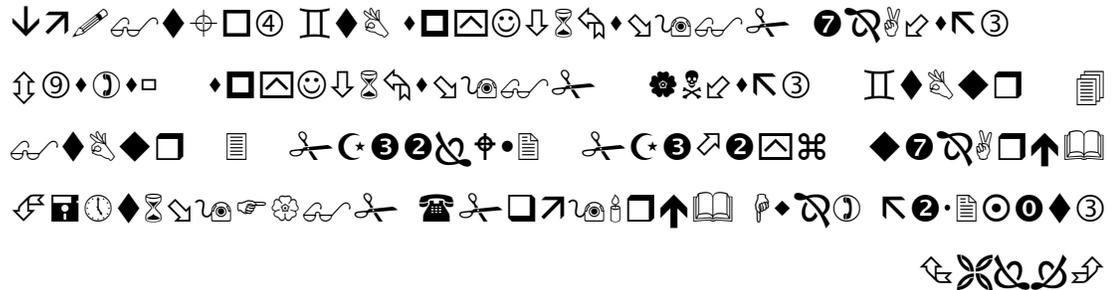
Bahkan Imam al-Ghazali menyatakan politik adalah *lahw* dan *la'ib* permainan yang memabukkan dan membuat lupa daratan. Kekuasaan dalam nalar fiqh siyasah cenderung bersumber dari nafsu yang sulit dikendalikan. Sebab itu para pemikir politik Islam klasik, saat membahas tentang institusi kekuasaan, sangat menekankan pentingnya akhlak, moral, dan etika. Karena berpolitik tanpa akhlak, moral dan etika bisa membuat agama ruang antara aku dan Tuhan direduksi menjadi situasi persaingan antara kami dan mereka. Bahkan, pertarungan pandangan, visi-misi, maupun tradisi politik di antara umat Islam tak jarang melebar (seolah-olah) merupakan perbedaan pandangan dalam memahami ajaran agama.

Politik kebangsaan ini pada gilirannya dihadapkan pada tantangan kecil yang besar. yaitu munculnya sekelompok kecil orang yang menggunakan asas-asas demokrasi justru untuk mengkampanyekan nilai-nilai yang jauh dari demokrasi. Kelompok kecil yang mengatas namakan agama islam untuk meraih simpati masyarakat dengan mereduksi nilai-nilai keagamaan yang selama ini dihidupi masyarakat Indonesia. Islam yang ramah, toleran, moderat berubah citra menjadi islam yang berang, reaksioner, intoleran, bahkan radikal. Kejayaan media sosial yang bebas dikendalikan orang perorang merupa ceruk memupuk pemahaman Islam

berkedok 'jihad' guna memerangi segala yang dianggapnya thogut. Tantangan yang muncul dari kelompok kecil ini berpotensi menjadi kekuatan besar di masa yang entah kapan apabila gerakannya yang militan tak sanggup kita saingi.³

Dalam Al-Qur'an ditemukan dua puluh kali kata hikmah, kesemuanya dalam konteks pujian. Salah satu di antaranya adalah surat Al-Baqarah (2) : 269

Siapa yang dianugerahi hikmah, maka dia telah dianugerahi kebajikan yang banyak.

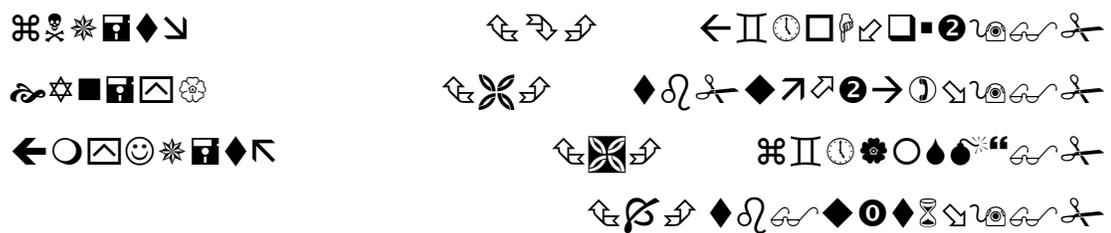


“Allah menganugerahkan al hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah”,

ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).”

(QSAI-Baqarah:269)

Dan surah Ar-rahman 1- 4



“(Allah yang maha pengasih, yang telah mengajarkan Al-Qur’an, Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara”.

³Indikator politik nahdlatul ulama jadi penentu kemenangan Jokowi diakses pada tanggal 29 mei 2019.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi komunikasi politik Nahdlatul Ulama PWNU ?
2. Bagaimana pandangan pengurus PWNU dalam menyikapi pencalonan Ma'ruf Amin calon wakil presiden 2019 ?

C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui politik NU dalam aspek budaya politik dan partisipasi politik.
- b. Untuk mengetahui pandangan dalam menyikapi pencalonan Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden 2019.

2.Kegunaan penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah jika tujuan penelitian tersebut dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran, baik secara teoritis maupun praktis, dalam proses penentuan pilihan dalam pemilu.

1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan penjelasan mengenai strategi komunikasi politik NU dalam pemilu pilpres 2019.
- b. Memberikan bahan masukan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu politik. Dalam artian tujuan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai karya ilmiah bagi yang ingin mengkaji studi tentang proses dalam pemilihan umum.

- c. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Manfaat praktis
 - a. Secara praktis ini di harapkan dapat memberi masukan kepada strategi komunikasi politik NU dalam pemilu pilpres 2019
 - b. Sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Poliik Islam.

E. Tinjauan Kepustakaan

Ahmad Robi Ulzikri “*Politik nahdlatul ulama dalam pemilihan presiden dan wakil prsiden 2019. Studi kasus pada warga nahdlatul ulama di kota Lampung*” Tulisan ini menjelaskan bahwaNU secara sruktural lebih mudah dalam membaca sikap dan pandangan dalam pilpres 2019. akan tetapi nahdiyah sebagai pengikutNU lebih sulit untuk dibaca. karena keberadaan mereka sepenuhnya tidak dalam kepenjuruan organisasi. Politik dan juga perannya sebagai organisasi kemasyarakatan namun tidak menjelaskan bagaimana sikap dan budaya politik NU secara jelas. NU bukan organisasi yang berisi orang-orang yang seragam pemikiran dan kecenderungan ideologi politiknya. Keragaman pandangan di internal NU ini bisa berarti bahwa meski ada kekhawatiran dari sebagain orang akan ancaman konservatisme agama yang semakin mengakar dengan keberadaan Ma’ruf Amin dalam pemerintahan⁴

Caesar Demas Edwinto “*Strategi komunikasi politik elit Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kediri tahun 2013*” Menjelaskan komunikasi politik yang dijalani oleh elit NU dan Muhamadiyah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Kota Kediri yakni secara organisasi, baik NU maupun Muhamadiyah tidak dinyatakan keterlibatan dalam proses pilwali kota Kediri. namun secara personal pada tingkat elit terdapat peran yang di lakukan masing-masing lembaga tersebut. Komunikasi politik yang dilakukan oleh NU maupun Muhamdiyah

⁴NU Pasca *Nasionalisme Mendahului Demokrasi* diakses pada 7 agustus 2019

adalah komunikasi politik yang di jalan kan berdasarkan atas statifikasi.Pareto yang membagi kelompok masyarakat yang memiliki keunggulan untuk memerintah dan yang idak memiliki keunggulan mana pun. NU juga memiliki stratifikasi elit yang terdiri atas elit yang di miliki unggulan memerintah dan terepektasi oleh kyai serta elit yang memiliki keunggulan untuk memerintah dengan gambaran sebagai kepengurusan harian NU⁵

Nurul Shobacha “*Startegi politik NU di era orde baru*” strategi NU yang digunakan untuk menjaga kehormonisan tiap warga Negara Indonesia adalah dengan menyetujui penggunaan pancasila sebagai dasar negara. namun NU juga tetap tegas meskipun NU sangat setuju dengan pancasila. Sebab NU khawatir P4 dimasa mendatang dapat menggantikan agama dan menjadi dasarr pedoman segala kegiatan.tiga strategi pergerakan dan perjuangan umat islam strategi strukural, kultural, mobilitas sosial⁶

Gabriel A.Almon dan Verba menjelaskan *budaya politik* di lima Negara yang kemudian melahirkan sebuah buku yang berpengaruh pada pertengahan adab ke dua puluh,(1960-1970) yaitu *The Civic Culture*.Almond mengasumsikan bahwa korelasi sistem politik akan mewujudkan orientasi dan tindakan politik.”*Kebudayaan Politik itu mengacu pada orientasi politik sikap warga Negara terhadap peranan sistem politik dan sikap terhadap pranan waga negarra yang ada di dunia sistem tersebut*”.⁷

Adelia Fitri “*Dinamika dan tantangan jelang pemilu presiden tahun 2019*”.pemilu umum adalah mekanisme memilih pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategi tertentu didalam lembaga politik formal,yakni lembaga legislative di tingkat pusat dan daerah.pemilihan umum adalah sebuah sarang untuk mewujudkan sistem demokrasi dalam Negara. Inti dari pemilu adalah penyampaian

⁵Caesar Demas Edwinarta *Strategi komunikasi politik Nahdlatul Ulama dan Muhamadiyah dalam pemilihan Walikota dan Wakil walikota Kediri* Jurnal Cd Edwinarta Tp.07 tahun 2018

⁶Nurul Shobacha *Strategi politik NU di era orde baru* Jurnal Riview Politik tahun 2012.

⁷Gabriel A.Almon dan Verba tahun 1984 hal 141

suara rakyat untuk membentuk sebuah lembaga perwakilan atau pemerintahan yang memiliki tugas menyelenggaraan sebuah Negara.⁸

Cita “*Urgensi pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung di era reformasi*” dalam jurnal tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung kedua pada era reformasi, yaitu pada tahun 2009, partai politik yang menjadi peserta pemilu legislative tidak dapat begitu saja mengusung calon presiden dan wakil presiden.⁹

Dian Dwi Jayanto “*Memperibungkan fenomena populisme islam di indonesia dalam perspektif politik antara gerakan nasional pengawal ulama NU*”. untuk meneguhkan diri sebagai kekuatan politik islam tidak lepas dari kebangkitan gerakan bela islam yang telah mereduksi pengaruh NU. sebagai organisasi islam di indonesia. dan analisis wacana dalam rangka memobilisasi kesadaran umat islam di Indonesia guna mendapatkan legitimasi pening untuk di kekemukakan. baik kerangka maupun teori.¹⁰

Mubarok, Afs “*Gerakan sosial lingkungan pemuda NU*” dalam konteks reorientasi kelembagaan NU kepada perjuangan keadilan sumberdaya keadilan dan kembali ke khittah dengan konteks baru. Jika pada masa awal pendirian NU menjadi antitesi dai kolonialisme dan wahabilisme maka untuk konteks sekarang yang di hadapkan adalah neolabilisme yang tidak mngenal batas. yang menyasa dalam pengaruh besar. Dengan memanfaatkan berbagai sentiment. termasuk salah satunya adalah agama.¹¹

⁸Fitri Adelia *dinamika dan tantangan jelang pemilu presiden tahun 2019.*

⁹Ria Casmi Arrsa *pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi jurnal konstitusi*, Vol 11 No 3, (malang : PPOTODA Univesita brawijaya, 2014), hlm. 521.

¹⁰Dian Dwi Jayanto *memperibungkan fenomena populisme islam di indonesia dalam perspektif politik antara gerakan nasional pengawal ulama NU*

¹¹Mubarok, AFS 2016, *Gerakan sosial lingkungan pemuda NU studi pada front nahdliyyin untuk kedaulatan sumber daya alam (FNKSDA)*, Universitas Gadjah Mada.

F.Kerangka Teori

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian diperlukan teori sebab teori memiliki peran penting. Dalam penelitian ini akan menggunakan teori strategi komunikasi menurut Dan O'haif et al ia menyatakan bahwa strategi komunikasi berate dapat memanfaatkan potensi di empat erea utama¹²

1. Pengetahuan situasional informal yang dimiliki dikumpulkan tentang syarat agar komunikasi sukses dan efektif dalam konteks tertentu.
2. Penentuan Tujuan setiap situasi komunikasi dapat dilihat sebagai aktifitas penentuan tujuan yang jelas dan tepat untuk organisasinya.

Dalam teori politik sekuler, agama tidak dipandang sebagai kekuatan. Agama hanya dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan persoalan individual.

Padahal secara fungsional ternyata kekuatan agama dan politik saling mempengaruhi. Memang dalam arti sempit ada diferensiasi, misalnya seperti diisyaratkan oleh interpretasi sahabat Ibnu Mas'ud terhadap ungkapan uli al-amr sebagai umara' (pemimpin formal pemerintahan), yang dibedakan dengan ulama sebagai pemimpin agama.¹³

Menggunakan teori Gabriel Almond dan verban tentang kebudayaan politik yang meliputi budaya politik parokial, subjek, dan partisipan. partisipasi politik dapat dianalisis menggunakan teori Milbath dan Goel dalam Miriam Budiarjo yang membagi tipe partisipasi politik dalam pemain, dan apatis. menganalisis sikap politik warga nahdiyin, peneliti menggunakan teori Abu Ahmadi dimana sikap politik dibagi 3 jenis

¹²Dan O' Hair, Gustav W. Friedrich, Lynda Dee Dixon, *Strategi Communication in Bussiness and the Professional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 30

¹³*Islam dan politik* <https://islam-dan-politikwww.nu.id> diakses pada tanggal 15 maret 2014.

yaitu sikap setuju, sikap menolak, dan sikap netral. Terhadap pencalonan Jokowi dan Ma'aruf Amin, sedangkan konsep

Bentuk budaya politik dari masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan dari sistem olah agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat variabel:

1. Kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain dengan membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok yang ada didalam masyarakat itu sendiri.
2. Kepentingan tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik.
3. Kebijakan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
4. Budaya politik orientasi subjek dari individu terhadap sistem politik.¹⁴

Hal terpenting adalah bahwa strategi dipilih untuk mencapai suatu hasil tertentu sebagaimana dinyatakan dalam tujuannya yang sudah ditetapkan.

Islam memahami politik bukan hanya soal yang berurusan dengan pemerintahan saja, terbatas pada politik struktural formal belaka, namun menyangkut juga kulturisasi politik secara luas. Politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Lebih dari itu, ia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani maupun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan.

¹⁴Miriam, Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Perilaku Memilih

Perilaku politik adalah tindakan atau kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan keputusan politik. Perilaku politik yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.¹⁵ Dalam pelaksanaan pemilihan umum di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan.

Dengan demikian hal ini yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam penelitian ini. ¹⁶

1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah.
2. Perilaku politik warga Negara biasa (baik individu maupun kelompok) yang pertama, bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakan keputusan politik. Sedangkan yang kedua berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang dilakukan oleh warga Negara biasa (individu maupun kelompok) disebut partisipasi politik.

Dalam melakukan kajian terhadap perilaku politik, dapat dipilih tiga unit analisis yaitu:

- a. Aktor politik (meliputi aktor politik, aktivitas politik, dan individu warga Negara biasa)
- b. Agregasi politik (yaitu individu aktor politik secara kolektif seperti partai politik birokrasi, lembaga-lembaga pemerintahan)
- c. Topologi kepribadian politik (yaitu kepribadian pemimpin, seperti Otoriter, Machiavelist, dan Demokrasi.

¹⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), Hal.131.

¹⁶ Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Hal. 15-16.

Menurut Alan Ware, ada tiga hal yang menyebabkan kader partai politik berpindah ke partai politik lainnya. Pertama, adanya pengaruh atau dorongan (*material incentives*), Kedua, pengaruh atau dorongan rasa kesatuan (*solidarity incentives*), Ketiga, pengaruh atau dorongan tujuan (*purposive incentives*) adanya kekuatan yang mendasari keyakinan ideologi.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cabang disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana cara mendapatkan data yang valid.

1. Tipe penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang masalah diteliti menyangkut bagaimana strategi komunikasi politik NU dan pandangan pengurus PWNU.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang digunakan merupakan data kualitatif data yang tidak terdiri dari angka-angka melainkan berupa gambaran dan kata-kata.¹⁸ Adapun secara terminologi pendekatan kualitatif adalah metode yang mana hasil penelitian lebih berkenaan dengan *interpretasi* terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁹ Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena tentang suatu yang dialami oleh obyek penelitian secara *holistik*, dan di deskripsikan dengan bentuk kata-kata dan bahasa. Pada konteks khusus yang natural dengan menggunakan metode ilmiah.²⁰ Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis *case study*, artinya penelitian ini berangkat dari studi kasus lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan.

¹⁷ Alan Ware, *political Partice and Party Sistem* (New York: Oxford University Press, 1996), Hal . 74-78.

¹⁸ Jalaludin, Rahmat. *Metode Penelitian Komunikasi* (RosdaKarya, Bandung, 2000), Hal:36

¹⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Alfabeta, Bandung, 2010), Hal:8

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitaif Edisi Revisi*. (Bandung, :RosdaKarya, 2007), Hal:6

Sumber data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat membantu melangkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Dalam mencari informasi guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. untuk memperoleh data penelitian yang lengkap dan dipertanggung jawaban kebenarannya. maka teknik pengumpulan data di gunakan penelitian dalam mengambil beberapa dan guna mendapatkan informasi ialah sebagai berikut :

A. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kumpulan data untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana dapat di katakana bahwa wawancara adalah suatu kejadian intraksi antara pewawancara dan sumber informasi yang di wawancarai secara langsung.²¹

Wawancara dilakukan penulis dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan masalah yang sedang diteliti guna mengumpulkan data data secara maksimal. Dan penulis lebih dahulu menentukan beberapa informasi kunci sebagai data.

²¹A.yusuf Muri, *Metodologi penelitian kualitatif dan penelitian gabungan* (Jakarta:kencana,2014),hal372

Informasi kunci yaitu orang yang dianggap lebih mengerti dan mengetahui serta memahami pokok permasalahan yang akan di gali,dan dan informasi kunci yaitu politik NU dalam pemilihan pilpres 2019.

B.Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian kualitatif.²²Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.observasi dilakukan untuk membuktikan terhadap informasi yang diberikan dengan fakta di lapangan.

C.Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan menggunakan dokumen resmi melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian.baik prosedur,peraturan,peraturan,gambar,laporan hasil pekerja serta berupa dokumen.²³

D.Analisis data

Analisa data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, terutama dalam tahap ini, seorang peneliti telah memasuki tahap pencapaian hasil temuannya. Oleh karena itu, dalam menganalisa data penulis menggunakan beberapa metode analisa data, tujuannya agar dapat mempermudah memaparkan dan menguraikan pokok-pokok permasalahan secara menyeluruh agar memperoleh hasil penelitian yang optimal.

206 ²²Lexy J Meleong,*Metode penelitian kualitatif*.(bandung : Remaja Rosda Karya,2004).hal

²³Ibit

- Pengumpulan data

Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk melengkapi data.

E.Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menjamkan, mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. Penulis tidak semata-mata menggunakan seluruh data yang diperoleh dan hasil wawancara dan observasi untuk dimasukkan dalam hasil penelitian. Melainkan mereduksi dengan cara menyederhanakan data sedemikian rupa. Cara mereduksi data ialah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan mengolong-golongkan ke dalam suatu pola yang luas.²⁴

Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah semua lapangan yaitu hasil dari wawancara, dan hasil observasi langsung, dan hasil dokumentasi kemudian dikelompokkan atau digolongkan sesuai dengan rumusan masalah.

F.Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan. Data yang disajikan harus sederhana dengan jelas agar mudah dibaca dan disajikan

²⁴Sugiono, hal231

H.Sistem Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini, dibagi kedalam lima bab, dengan tujuan untuk mempermudah memahami hasil penelitian ini nantinya, oleh sebab itulah penulis akan menguraikannya secara sistematis. Penelitian yang akan dibahas terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas latar belakang, rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Deskripsi Objek Penelitian Gambaran NU tentang masalah diteliti, menyangkut strategi komunikasi politik Nahdlatul Ulama dan pandangan pengurus PWNU dalam menyikapi pencalonan Ma'ruf Amin calon wakil presiden 2019.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan strategi komunikasi politik PWNU pilpres 2019

BAB IV Penutup Membahas kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dan pertanyaan yang dirumuskan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini.